



Analisis Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram

Yessy Kusuma Wati
Universitas Mataram
yessykusumaw@gmail.com

Baiq Anggun Hilendri L
Universitas Mataram
hilendria@unram.ac.id

Yusli Mariadi
Universitas Mataram
yuslimariadi@unram.ac.id

Abstract

Public sector organizations must apply to the concept of value for money in the use of resources and the implementation of program activities in the organization. The goals desired by the community include accountability, namely being economical in the procurement and allocation of resources, efficiency in utilizing resources with maximized results and minimized use, and being effective in achieving goals and objectives in public sector organizations. The purpose of this study was to analyze the economy, efficiency and effectiveness of the implementation of the budget realization at the Mataram City Public Works and Spatial Planning Office in 2016-2020. This study uses a qualitative descriptive method and the research design uses a case study. The results of this study indicate that from an economic point of view, the implementation of the budget at the Mataram City Public Works and Spatial Planning Office for 2016-2020 has been carried out economically. In terms of efficiency, the implementation of the budget for 2016-2019 has been carried out efficiently, but for 2020 it is carried out quite efficiently due to the lowest budget ceiling received and the policy of budget refocusing. Meanwhile, in terms of effectiveness, the implementation of the 2016-2020 budget in achieving organizational goals and objectives has been carried out quite effectively based on indicators of program success, target success, program satisfaction and suitability of inputs and outputs.

Keywords: Budget Execution, Economy, Efficiency, Effectiveness

Abstrak

Organisasi sektor publik harus menerapkan konsep dari value for money dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program kegiatan di organisasi. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, dalam memanfaatkan sumber daya dengan hasil yang dimaksimalkan dan penggunaan yang diminimalkan, serta efektif dalam mencapai suatu sasaran dan tujuan pada organisasi sektor publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan desain penelitiannya menggunakan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi ekonomi, pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram tahun 2016-2020 sudah dilaksanakan secara ekonomis. Dari segi

efisiensi, pelaksanaan anggaran belanja untuk tahun 2016-2019 sudah dilaksanakan secara efisien, tetapi untuk tahun 2020 dilaksanakan secara cukup efisien dikarenakan pagu anggaran yang diterima paling rendah dan adanya kebijakan refocusing anggaran. Sedangkan dari segi efektivitas, pelaksanaan anggaran belanja tahun 2016-2020 dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi telah dilaksanakan secara cukup efektif berdasarkan indikator keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program dan kesesuaian input dan output.

Kata Kunci: Pelaksanaan Anggaran Belanja, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

Received : 5-09-2022 ; Revised: 21-11-2022 ; Accepted: 14-12-2022

© ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu

<https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i2.6920>

Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia



Pendahuluan

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membuat pemerintah dalam pelimpahan penyelenggaraan tugas harus memperhatikan kunci utama kekuatan ekonomi nasional yaitu menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dalam rangka mewujudkan mobilitas pembangunan daerah yang semakin meningkat, masyarakat secara otomatis juga akan meningkatkan tuntutan kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan keuangan yang bersih dan sesuai dengan peraturan. Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu wujud nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai hasil maksimal dengan pengelolaan yang terstruktur dimulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pada keuangan daerah (Bunna, 2021).

Dalam mengelola keuangan, organisasi sektor publik perlu memerhatikan konsep dari *value for money* dalam melaksanakan setiap kegiatan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (daya guna) dalam memanfaatkan sumber daya dengan hasil yang dimaksimalkan dan penggunaan yang diminimalkan, , serta efektif (berhasil guna) dalam mencapai suatu sasaran dan tujuan pada organisasi sektor publik (Basariyah, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kinerja organisasi sektor publik dapat dicerminkan dari anggaran yang ditetapkan. Anggaran dinyatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Nordiawan, 2006: 48). Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah menjadi salah satu elemen yang

penting dalam pengelolaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk mewujudkan ekonomi, efisien dan efektif pada pengeluaran daerah, maka organisasi sektor publik harus sangat memerhatikan pengalokasian anggaran dengan program yang direncanakan. Jika penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dan porsinya, maka dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan dana atau program yang tidak tercapai.

Sebagaimana dikutip dari Lombok Post (4 Juli 2020), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram hanya bisa melakukan program operasional pembersihan drainase dan tidak ada proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pemangkasan anggaran (*Refocusing*). Anggaran semula pada Dinas PUPR sekitar Rp78 Miliar, akibat dari wabah Virus Corona anggaran dikurangi sebesar Rp27 Miliar sehingga berdampak pada program kegiatan yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam melaksanakan visi, misi dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menetapkan berbagai target capaian kinerja pendapatan dan belanja di setiap periodenya, baik dalam konteks program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, meningkatkan pengelolaan anggaran secara optimal, dan untuk mendukung terwujudnya *good governance* pada sektor publik. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti ingin mengetahui bagaimana ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2009:206) menyatakan bahwa analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa suatu data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Desain penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus. Raco (2010:49) menjelaskan bahwa studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

Subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan, bendahara pengeluaran, kepala sub bagian perencanaan dan staf ahli bagian perencanaan. Adapun lokasi penelitian ini berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas

data dengan teknik triangulasi, dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, wawancara pada waktu yang tepat agar data yang diperoleh valid dan kredibel. Teknik triangulasi penelitian menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber berbeda dengan menggunakan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2015 : 373).

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Ekonomi dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram

Ekonomi dalam pelaksanaan realisasi belanja sering diartikan sebagai kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara cermat dan hati-hati (*prudency*) dan tidak adanya pemborosan (Fitriana, 2017). Pelaksanaan belanja yang ekonomis, dapat diketahui melalui perhitungan dengan menggunakan kriteria analisis pengukuran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Dengan menghitung tingkat ekonomi diperoleh tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Ekonomi Pelaksanaan Anggaran Belanja DPUPR Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ekonomi	Kriteria
2020	50.225.298.242	46.249.820.041	92.1%	Ekonomis
2019	112.883.234.831	103.529.739.588	91.7%	Ekonomis
2018	139.714.919.877	129.695.856.340	92,8%	Ekonomis
2017	161.464.953.100	146.801.634.584	90.9%	Ekonomis
2016	198.586.583.360	185.777.148.481	93,5%	Ekonomis

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan LRA DPUPR Kota Mataram (2022)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram pada tahun 2016-2020 memiliki tingkat ekonomi rata-rata di atas 90%. Untuk tahun 2016 tingkat ekonomi paling tinggi yaitu berada pada 93,5%. Hal ini dikarena jumlah jumlah pagu anggaran yang diterima untuk mendanai program/kegiatan serta pengadaan barang dan jasa pada dinas paling besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun 2017 menunjukkan tingkat ekonomi sebesar 90,9%, tahun 2018 meningkat menjadi 92,8%, tahun 2019 tingkat ekonominya sebesar 91.7% dan pada tahun 2020 tingkat ekonomi sebesar 92,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja setiap tahunnya sudah ekonomis. DPUPR Kota Mataram juga telah berhasil dalam melakukan

upaya penghematan belanja, hal ini tercermin dalam realisasi anggarannya yang tidak melebihi target anggaran yang ada.

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat ekonomis pada DPUPR Kota Mataram dalam pelaksanaan realisasi belanja juga disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran DPUPR Kota Mataram, sebagai berikut:

“Ya pasti, jadi sebelum kerja itu dilakukan survei terlebih dahulu. Biasanya 1 tahun sebelumnya, misalnya ada perbaikan jalan membutuhkan anggaran berapa yang harus disediakan” (Wawancara SA, 27 Juni 2022)

Senada dengan hal tersebut disampaikan juga oleh Kasubag Perencanaan yaitu :

“Kalau survei awal biasanya koordinasi dengan kelurahan, kepala lingkungan dn RT. Kalau sinitasi dengan dinas kesehatan, lintas OPD dengan balai jalan untuk pembangunan jalan, dan untuk bidang sumber daya air survey dengan koordinasi dengan balai wilayah sungai dan bappeda”. (Wawancara RA, 4 Juli 2022)

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa sebelum menggunakan anggaran untuk pelaksanaan suatu program dan kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram telah melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan anggaran kas yang akan digunakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran kas dan tidak adanya pemborosan dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga anggaran yang tersedia dapat tercukupi. Untuk menunjang kegiatan survei dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, DPUPR Kota Mataram, juga melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah dan perangkat desa yang terkait.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram dalam memaksimalkan tingkat ekonomi dalam pengadaan dan alokasi sumber daya finansial seperti dikemukakan oleh Kasubag Perencanaan DPUPR Mataram, yaitu:

“Biasanya dari keuangan ada perwal khusus seperti SSH (Standar Satuan Harga), Standar Biaya umum (SBU) untuk menentukan besaran maksimum besaran anggarannya ada juga edaran untuk proporsi anggaran untuk pencairan atau penarikan anggaran biasanya ada persentasenya 15%, 25%, 35% dan 25% untuk 1 tahunnya, sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku pada saat itu” (Wawancara RA, 4 Juli 2022)

Hal ini dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pemborosan dan juga kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh staf ahli perencanaan, sebagai berikut:

“Kalau pemborosan sih tidak ada. Strateginya yaitu sebelum mengeksekusi anggaran kita sudah mempunyai target dan sudah dapat alokasi pagu anggaran lalu kita menyusun skala prioritas”. (Wawancara MA, 4 Juli 2022)

Senada dengan pernyataan di atas, Bendahara Pengeluaran menyampaikan, bahwa :

“Strategi yang kami lakukan yaitu merespon dengan cepat jika dokumen dan berkasnya lengkap, seperti dokumen kontrak, berita acara, bukti serah terima pekerjaan, dokumentasi pekerjaan, dan spj, lalu kita akan ajukan dan bila sudah sesuai akan di tandatangan dari ppknya setelah itu akan diproses” (Wawancara SA, 27 Juni 2022).

Dari pernyataan di atas, bahwa DPUPR Kota Mataram melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang di mana untuk mengeksekusi anggaran, DPUPR Kota Mataram menerapkan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan pemerintah dan proporsi anggaran yang ada. Serta merespon dengan cepat jika dokumen dan berkas pada setiap bidang telah lengkap, seperti dokumen kontrak, berita acara, bukti serah terima pekerjaan, dokumentasi pekerjaan, dan SPJ, hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pencairan anggaran.

2. Analisis Efisiensi dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan pencapaian sasaran (output) dengan biaya (input) yang terendah atau minimal untuk diperoleh hasil (output) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah anggaran belanja tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka diperlukannya pengukuran efisiensi terhadap pelaksanaan belanja. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan realisasi belanja. Belanja langsung adalah suatu input (sumber daya) yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran (output).

$$Efisiensi = \frac{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}{Reaslisasi Anggaran Belanja}$$

Kriteria analisis efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Dengan menghitung tingkat efisiensi diperoleh dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja DPUPR Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Belanja	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2016	178.546.187.402	185.777.148.481	96,1%	Efisien
2017	135.889.490.486	146.801.634.584	92,6%	Efisien
2018	122.002.719.130	129.695.856.340	94,1%	Efisien
2019	95.546.063.193	103.529.739.588	92,3%	Efisien
2020	38.255.941.580	46.249.820.041	82,7%	Cukup Efisien

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan LRA DPUPR Kota Mataram (2022)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada DPUPR Kota Mataram untuk tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan persentase rata-rata di atas 90% hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja telah dilaksanakan secara efisien. Untuk tahun 2020 menunjukkan persentase 82,7%, yang berarti pelaksanaan anggaran dilakukan secara cukup efisien. Karena untuk tahun 2020 pagu anggaran yang diterima oleh dinas paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Staf Ahli Perencanaan DPUPR Kota Mataram, yaitu:

“Karena covid-19, jadi anggaran untuk tahun 2020 sangat rendah. Hampir semua organisasi perangkat daerah anggarannya dipangkas (refocusing)” (Wawancara MA, 4 Juli 2022).

Upaya efisiensi belanja yang dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram, disampaikan oleh bendahara pengeluaran sebagai berikut:

“Kita melakukan dengan menempuh kebijakan strategi penghematan dalam pemakaian dan pengadaan pelayanan administrasi perkantoran, seperti alat listrik, air dan telepon, alat kebersihan, penggunaan komputer dan perjalanan dinas” (Wawancara SA, 27 Juni 2022).

Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi anggaran belanja disampaikan oleh Kasubag Keuangan, sebagai berikut:

“Besarnya anggaran yang tidak terserap dikarenakan beberapa pekerjaan yang bernilai besar, proses pengadaannya melalui pelelangan umum sehingga tidak jarang nilai kontraknya berada jauh di bawah pagu anggaran. Dan adanya kendala teknis di lapangan yang banyak dihadapi juga mempengaruhi penyerapan anggaran, karena berdampak pada batalnya pelaksanaan kegiatan”. (Wawancara IA, 1 Juli 2022)

Dari penjelasan tersebut, diketahui terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi anggaran belanja pada DPUPR Kota Mataram dalam pencapaian sasaran

atau target yang telah ditetapkan, di mana terdapat beberapa pekerjaan yang bernilai besar, seperti pada bidang konstruksi, terkadang proses pengadaannya melalui pelelangan umum sehingga tidak jarang nilai kontraknya berbeda dan berada jauh di bawah pagu anggaran yang diharapkan. Dan adanya kendala teknis di lapangan yang banyak dihadapi juga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran, karena akan berdampak pada batalnya pelaksanaan kegiatan. Kendala teknis di lapangan dapat berupa perubahan kondisi cuaca dan iklim, perubahan pada harga bahan baku secara tiba-tiba dan respon masyarakat yang kurang mendukung.

3. Analisis Efektivitas dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan suatu tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi dan program. Menurut Campbell dalam Baria (2019) indikator dalam pengukuran efektivitas yaitu:

a. Keberhasilan Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram memiliki program-program dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk Kota Mataram dan pencapaian target kinerja organisasi. Namun faktor dari keberhasilan suatu program juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran kas dan juga program prioritas dari walikota, kepala dinas dan kepala bidang. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kasubag Perencanaan DPUPR Kota Mataram, yaitu :

“Untuk keberhasilan program di tahun 2016 hingga 2018 berjalan secara efektif, namun untuk anggaran yang terbatas di tahun 2019 dan 2020 kita melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas, usulan masyarakat yang telah disetujui dan kegiatan yang bersifat urgent jadinya capaian untuk tahun tersebut belum optimal” (Wawancara RA, 4 Juli 2022).

Senada dengan pernyataan tersebut, Bendahara Pengeluaran DPUPR Kota Mataram menyatakan bahwa:

“Keberhasilan program sangat berpengaruh pada ketersediaan dana anggaran, jika anggarannya minim maka program tidak bisa tercapai dengan maksimal seperti tahun 2019-2020 ini, trend target kinerja menurun”. (Wawancara SA, 27 Juni 2022)

b. Keberhasilan Sasaran

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terlayannya kebutuhan air minum & Saprass Pengolahan air limbah yang memadai bagi masyarakat	Meningkatnya akses air minum & sarana prasarana pengolahan air limbah yang layak	Cakupan layanan air minum	68%	72%	76%	80%	90%	90%
			Cakupan akses pengolahan air limbah	88%	90%	92%	95%	100%	100%
2	Tersedianya infrastruktur pengendali banjir dalam kondisi baik	Meningkatnya penanganan banjir	Berkurangnya titik banjir	1 titik	1 titik	1 titik	2 titik	1 titik	1 titik
3	Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan & jembatan dalam kondisi mantap	65%	70%	75%	82%	85%	90%
4	Terwujudnya bangunan Gedung yang sesuai standar	Meningkatnya bangunan Gedung yang sesuai standar	Persentase bangunan yang memiliki sertifiat laik Fungsi (SLF)	0	2%	5%	8%	10%	13%
5	Terwujudnya penataan ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja penataan ruang	0	2.01	2.01	2.5	2.51	2.51
6	Tersedianya infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Luas area sawah yang terdiri	1202 Ha	1202 Ha	1202 Ha	1202 Ha	1202 Ha	1202 Ha

Sumber: Dokumen Rencana Strategis DPUPR Kota Mataram (2022)

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa DPUPR Kota Mataram memiliki target kinerja tahunan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 hingga 2021. Bisa terlihat untuk setiap tahunnya telah memiliki persentase output yang harus dicapai. Adapun indikator dari sasarannya berupa cakupan layanan

air minum, cakupan akses pengolahan air limbah, berkurangnya titik banjir, jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, bangunan yang memiliki Serftifikasi Layak fungsi, nilai kinerja penataan ruang dan luas area sawah untuk irigasi.

“Iya, Sampai dengan saat ini pelayanan umum terhadap program dan kegiatan tersebut sudah cukup dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan” (Wawancara MA, 4 Juli 2022)

c. Kepuasan Terhadap Program

Dengan melihat pencapaian selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 pada Rencana Strategis DPUPR Kota Mataram menunjukkan kepuasan terhadap program cukup efektif. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kasubag Perencanaan DPUPR Kota Mataram, yaitu:

“Jika dianalisis dari trend indikator sebenarnya 50% 50%, karena dilihat dari tahun 2016 hingga 2021 pada renstra yaitu 80% tercapai. Untuk tahun 2019 hingga 2020 pagu anggaran dinas sedikit, karena adanya refocusing anggaran akibat dari covid-19. kita telah memaksimalkan penggunaan anggaran yang terbatas tersebut agar indikator dapat tercapai walaupun kurang optimal.” (Wawancara RA, 4 Juli 2022)

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Kasubag Keuangan DPUPR Mataram, yaitu :

“Hanya saja jika dilihat dari porsi anggaran memang semakin lama semakin turun. Mungkin hal ini disebabkan karena adanya covid-19. Banyak sebenarnya yang tidak bisa tercapai secara optimal karena diakibatkan oleh covid-19 sehingga banyak usulan yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi anggaran yang terbatas” (Wawancara IA, 1 Juli 2022).

Kepuasan terhadap program yang cukup efektif, ditunjukkan juga dengan telah dilaksanakannya program dan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana untuk masyarakat. Dana yang digunakan untuk kegiatan ini berasal dari APBD Kota Mataram berupa Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah. Kepuasan Masyarakat terhadap realisasi program DPUPR Kota Mataram, sebagai berikut:



Gambar: Pengolahan Air Limbah
Sumber: Peneliti 2022

d. Kesesuaian Input dan Ouput

Ketersediaan input sangat berpengaruh terhadap output yang diperoleh untuk capaian kinerja pada organisasi sektor publik, hal ini dinyatakan oleh Bendahara pengeluaran DPUPR Kota Mataram, yaitu:

“Anggaran yang ada, kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai output dari setiap program, pelaksanaan program juga sejauh ini berjalan cukup efektif” (Wawancara SA, 27 Juni 2022)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kesesuaian input dan output dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada DPUPR Kota Mataram yaitu kondisi di lapangan dan perubahan perencanaan pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Kasubag Perencanaan DPUPR Kota mataram, yaitu:

“yang mempengaruhi output program biasanya kondisi dilapangan, misalnya ada perubahan harga pada bahan-bahan, perubahan volume, perubahan cuaca yang ekstrem sehingga akan mempengaruhi anggaran yang ada. Dan juga perubahan perencanaan pekerjaan, misalnya ada suatu pekerjaan yang telah direncanakan disuatu lokasi namun ada penolakan, lokasi yang ada lebih kecil dari rencana awal maka dapat menyebabkan perubahan pada output.” (Wawancara RA, 4 Juli 2022)

Pembahasan

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa pelaksanaan realisasi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram sudah menerapkan prinsip *value for money* yaitu berdasarkan pada indikator ekonomi, efisiensi dan efektivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori Stewardship dapat diterapkan pada penelitian mengenai sektor publik non profit maupun profit, di mana organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan terhadap hubungan antara steward dengan principal. Teori Stewardship yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan organisasi perangkat daerah sebagai steward dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola anggaran terhadap penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut steward (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram) mengerahkan kemampuan dan keahlian sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat terealisasi dan dipertanggungjawabkan. DPUPR Kota Mataram berusaha

secara maksimal dalam mencapai tujuan pemerintah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*principals*). Adapun pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Ekonomi Dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram

Pelaksanaan realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram untuk tahun 2016-2020 memiliki tingkat ekonomi rata-rata diatas 90%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja setiap tahunnya sudah ekonomis. DPUPR Kota Mataram juga telah berhasil dalam melakukan upaya penghematan belanja. Hal yang dilakukan agar pelaksanaan belanja tetap ekonomis yaitu dengan melakukan survei awal dilapangan dan juga melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan yang selalu diterapkan oleh DPUPR Kota Mataram dalam memaksimalkan tingkat ekonomi dalam pengadaan dan alokasi sumber daya finansial yaitu dengan berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) yang digunakan untuk setiap unit barang/jasa yang berlaku dan juga penggunaan Standar Biaya Umum (SBU) untuk harga setiap unit non barang/jasa seperti honorium dan perjalanan dinas. Hal ini dilakukan oleh DPUPR sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pemborosan dan kepatuhan terhadap aturan.

2. Efisiensi dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram

Dalam pencairan dana untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan DPUPR Kota Mataram selalu mengacu terhadap dokumen pelaksana anggaran dan ketersediaan anggaran kas yang ada. Hal ini dilakukan agar ketersediaan dana dapat mencukupi pekerjaan atau program yang akan dilakukan sehingga target kinerja dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang ada. Pelaksanaan anggaran belanja pada DPUPR Kota Mataram untuk tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan persentase rata-rata di atas 90% hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja telah dilaksanakan secara efisien. Dan untuk tahun 2020 menunjukkan persentase 82,7%, yang berarti pelaksanaan anggaran dilakukan secara cukup efisien. Karena untuk tahun 2020 ini pagu anggaran yang diterima oleh dinas paling rendah dan adanya kebijakan refocusing. Upaya efisiensi belanja telah dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram, dengan menempuh kebijakan strategi penghematan pada sebagian program dan kegiatan. Seperti penghematan dalam melakukan pengadaan barang&jasa, pemakaian listrik,air telepon dan

perjalanan dinas Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi anggaran belanja yaitu adanya besaran anggaran yang tidak terserap dan kendala teknis dilapangan.

3. Efektivitas dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran ahir kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, DPUPR Kota Mataram dalam pelaksanaan realisasi belanjanya menunjukkan pelaksanaan realisasi anggaran belanja yang cukup efektif. Hal tersebut berdasarkan temuan pada indikator dalam pengukuran efektivitas sebagai berikut:

a. Keberhasilan Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram memiliki berbagai program dan kegiatan yang telah direalisasikan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk Kota Mataram dan pencapaian target kinerja organisasi. Faktor dari keberhasilan program juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran kas dan penentuan program prioritas dari walikota, kepala dinas dan kepala bidang.

b. Keberhasilan Sasaran

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di DPUPR Kota Mataram sudah cukup efektif. Namun, ada beberapa Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Mataram seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kebutuhan akan hunian, dan terbatasnya lahan.

c. Kepuasan Terhadap Program

Dengan melihat pencapaian selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 pada Rencana Strategis DPUPR Kota Mataram menunjukkan kepuasan terhadap program cukup efektif. Karena dari penjelasan sebelumnya, program yang dilaksanakan bersifat prioritas tidak secara keseluruhan, hal ini diakibatkan oleh minimnya anggaran yang tersedia khususnya ditahun 2019 dan 2020 karena adanya kebijakan refocusing anggaran, jadi pagu anggaran yang diterima sangat terbatas..

d. Kesesuaian Input dan Output

Kesesuaian input dan output, didasarkan pada ketersediaan anggaran kas (input) untuk mendanai suatu program dan kegiatan (output). Dalam hal ini input dan output yang diperoleh sudah cukup efektif, karena sudah adanya realisasi dari program yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biasanya kondisi dilapangan, misalnya ada

perubahan harga pada bahan-bahan, perubahan volume, perubahan cuaca yang ekstrem sehingga akan mempengaruhi anggaran yang ada. Dan juga perubahan perencanaan pekerjaan, misalnya ada pekerjaan yang telah direncanakan disuatu lokasi namun ada penolakan, lokasi yang ada lebih kecil dari rencana awal maka dapat menyebabkan perubahan pada output.

Dampak sosial dari penerapan indikator value for money, yaitu ekonomi, efisien dan efektif pada realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja, antara lain :

1. Terlayannya kebutuhan air minum dan sapsras pengolahan air limbah yang memadai. Dalam hal ini, bidang cipta karya pada DPUPR Kota Mataram melaksanakan pembangunan /rehabilitasi MCK Komunal di beberapa kelurahan di Kota Mataram. Kegiatan ini termasuk pembuatan septictank dan atau sistem pengolahan air limbah dalam satu lokasi.
2. Tersedianya infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik
Seksi operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air pada DPUPR Kota Mataram, telah menangani pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang ada di wilayah kota Mataram.
3. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas
Bidang bina marga DPUPR Kota Mataram melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta pembuatan jalan dan jembatan yang ada di Kota Mataram, agar akses jalan umum dan jembatan lebih baik.
4. Pengendalian dan Pemanfaatan Jalan, sarana dan prasarana
DPUPR Kota Mataram juga telah menangani pelaksanaan pada pekerjaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan melakukan pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kota Mataram agar fasilitas infrastruktur di Mataram dapat terpenuhi dengan baik.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan realisasi belanja berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan *value for money* (Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram untuk tahun 2016-2020 memiliki tingkat ekonomi rata-rata diatas 90%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja setiap tahunnya sudah dilaksanakan secara ekonomis. DPUPR Kota Mataram telah berhasil dalam melakukan upaya penghematan belanja, dengan menggunakan kebijakan Standar Satuan Harga (SSH) untuk setiap unit barang/jasa yang berlaku dan juga penggunaan Standar Biaya Umum (SBU) untuk harga setiap unit non barang/jasa seperti honorium dan perjalanan dinas
2. Pelaksanaan anggaran belanja pada DPUPR Kota Mataram untuk tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan persentase rata-rata diatas 90% hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja telah dilaksanakan secara efisien. Dan untuk tahun 2020 menunjukkan persentase 82,7%, yang berarti pelaksanaan anggaran dilakukan secara cukup efisien. Karena untuk tahun 2020 ini pagu anggaran yang diterima oleh dinas paling rendah dan adanya kebijakan refocusing anggaran.
3. DPUPR Kota Mataram dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran akhir kebijakan telah menunjukkan pelaksanaan realisasi anggaran belanja yang cukup efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal tersebut berdasarkan indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu :
 - a. *Keberhasilan Program*, DPUPR Kota Mataram memiliki berbagai program dan kegiatan yang telah direalisasikan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk Kota Mataram
 - b. *Keberhasilan Sasaran*, Pencapaian DPUPR Kota Mataram terhadap target kinerjanya sudah cukup efektif. Namun, ada beberapa Faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Mataram seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kebutuhan akan hunian, dan terbatasnya lahan.

- c. *Kepuasan terhadap Program*, Pencapaian selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 pada Rencana Strategis DPUPR Kota Mataram menunjukkan kepuasan terhadap program cukup efektif
- d. *Kesesuaian Input dan Output*, Dalam hal ini anggaran (input) yang ada dengan output yang diperoleh sudah berjalan cukup efektif, karena DPUPR Kota Mataram telah merealisasikan penggunaan input secara optimal untuk keberhasilan output yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi kesesuaian input dan output yaitu kondisi dilapangan, perubahan volume, perubahan cuaca yang ekstrem.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu pelaksanaan anggaran belanja harus bisa memenuhi untuk setiap program dan kegiatan, oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam dengan teori berbeda sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya pelaksanaan realisasi belanja.

Referensi

- Baria, K. (2019). Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Unismuh*, 53(9). www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Basariyah, S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 5(32), 63–74.
- Bunna, C. S. H. (2021). *Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo* [Muhammadiyah Makassar]. UNISMUH
- Fitriana. (2017). Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba. *Unismush*. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2018.07.012><http://www.capsulae.com/media/Microencapsulation - Capsulae.pdf><https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2019.05.001>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Post, L. (2020). *Anggaran PUPR Mataram Tersedot Korona, Tersisa Hanya Untuk Penanganan Sampah*. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/04/07/2020/anggaran-pupr-mataram-tersedot-korona-tersisa-hanya-untuk-penanganan-sampah/>, Diakses pada 23 Februari 2022 Pukul 16.46
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.